

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

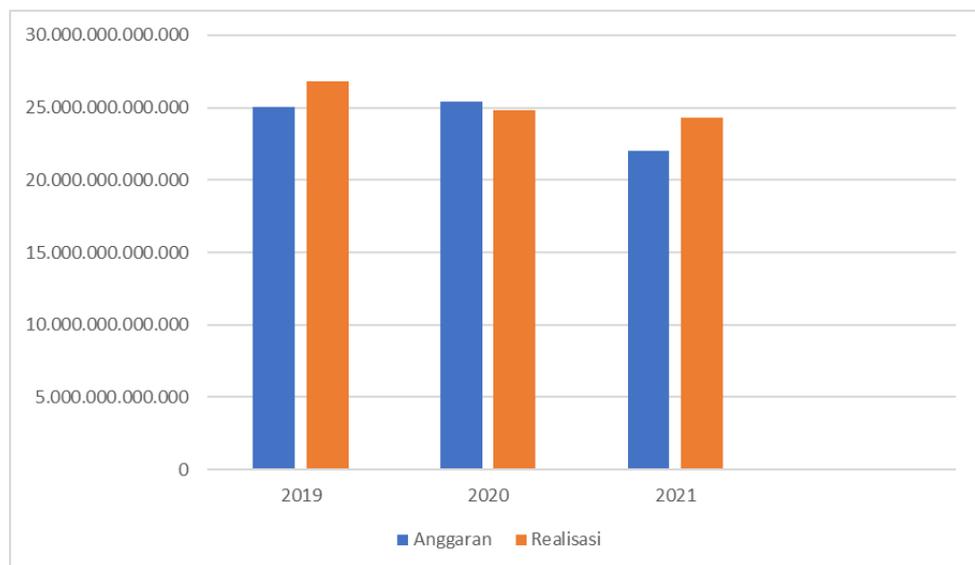
### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi kemajuan suatu negara harus didukung oleh semua komponen pemerintahan baik dari level teratas hingga paling bawah. Pada area dilevel bawah yang berwenang adalah ranah provinsial hingga ranah kabupaten hingga daerah istimewa, dalam pengelolaan keuangan ranah pemerintah daerah diatur dalam “Undang-undang No. 33 Tahun 2004”, serta mengacu pada “bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3” pada bagian ini menjelaskan bahwa dalam sistem pembagian keuangan didasari pada konsep keadilan, transparan, demokratis dan efisien agar menciptakan perokonomian negara yang sehat dan baik.

Pada ranah otonomi daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengembangkan potensinya. Maka semua baik dari pemerintah kota maupun provinsi diberikan wewenang secara mandiri dalam pembuatan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Serta mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintahan diberikan kuasa untuk menentukan prioritas dan menjaga keseimbangan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Bahrudin (2017) menyatakan APBD adalah rincian dari rencana kerja dari suatu entitas pemerintahan berupa biaya selama 1 periode yang ingin diapakai dan yang akan menyetujui APBD adalah pihak DPRD.

Salah satu solusi dalam permasalahan yang terjadi pada ranah pemerintahan daerah menggunakan “Anggaran Berbasis Kinerja”. Menurut Mardiasmo (2017) Anggaran Berbasis Kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan tidak adanya

tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Pendekatan ini menekankan pada Rasio Keuangan Daerah dan pengawasan atas kinerja output sehingga jelas tujuan dan sasaran kerjanya. Diharapkan dengan adanya pengukuran kinerja dengan metode ini, masyarakat secara luas akan lebih mengetahui dan dapat menilai secara fokus tentang bagaimana pemerintah daerah provinsi dalam memajemen atau mengelola APBD untuk merealisasikan kebijakan berdasarkan pada sasaran yang telah ditentukan, apakah terjadi pemborosan atau tidak, bagaimana hasilnya dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan sasaran awal atau tidak, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.



(Sumber: Postur APBD, data diolah)

**Gambar 1.1 Grafik Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan**

Berdasarkan tabel diatas angka anggaran dan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 anggaran sebesar Rp25.071.900.000.000 terealisasi sebesar Rp26.799.520.000.000 atau 106,89%. Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp25.432.750.000.000 terealisasi sebesar Rp24.819.600.000.000 atau 97,59%. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp22.010.040.000.000 terealisasi sebesar Rp24.329.350.000.000 atau

110,54%. Pada tahun 2019 terjadi *Overpower* (realisasi lebih tinggi dari anggaran) di realisasi anggaran nya sedangkan pada tahun 2020 terjadi *Underpower* (Anggaran lebih tinggi dari realisasi) direalisasi anggaran nya, dan pada tahun 2021 terjadi lagi *overpower* direalisasi anggaran nya.

Penelitian yang berkaitan dengan APBD telah banyak dilakukan dan dengan hasil yang berbeda-beda. Gabby Febryanti Sahara dan Muzdalifah (2019) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 9 kabupaten masih sangat kurang dan 4 kabupaten/kota kurang, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 4 kabupaten masih sangat rendah, 7 kabupaten rendah dan 2 kota cukup mandiri, rata-rata rasio efektivitas PAD hampir semua kabupaten/kota sangat efektif kecuali kota Banjarmasin efektif, rasio efisiensi keuangan daerah 9 kabupaten/kota kurang efisien dan 2 kabupaten cukup efisien, sedangkan kota Banjarbaru tidak efisien, rasio pertumbuhan PAD bernilai positif. Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo (2022) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019-2021 Di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi fenomena yaitu wabah Covid-19 dan Bencana Banjir. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa bagus kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks pengelolaan keuangannya pada saat terjadinya fenomena tersebut. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan Fenomena diatas maka akan dilakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 dengan menggunakan Metode Rasio keuangan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018-2023 dengan menggunakan Metode Rasio Keuangan Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018-2023 dengan menggunakan Metode Rasio Keuangan Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa yang akan datang.
2. Bagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan  
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga bisa jadi bahan referensi bagi penulis selanjut nya untuk melanjutkan atau memperbaharui peneliam ini nanti nya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

Tingkat kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023. Pada rasio derajat desentralisasi menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 57% artinya Provinsi Kalimantan Selatan sangat baik dalam mengkontribusikan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada rasio efektivitas menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 103% artinya Provinsi Kalimantan Selatan efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah. Pada rasio efisiensi menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 94% artinya Provinsi Kalimantan Selatan efisien dalam menggunakan realisasi pendapatan daerah. Pada rasio kemandirian menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 137% artinya Provinsi Kalimantan Selatan delegatif atau pemerintah pusat tidak lagi ikut campur tangan dalam pemerintahan daerah.

Pada rasio pertumbuhan menunjukkan hasil rata-rata rasio diangka 7% artinya Provinsi Kalimantan Selatan rendah sekali dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada rasio belanja modal menunjukkan hasil rasio diangka 17% artinya Provinsi Kalimantan Selatan berada pada porsi umum dalam menggunakan anggaran belanja modal. Pada rasio belanja operasi menunjukkan hasil rasio diangka 62% artinya Provinsi Kalimantan Selatan berada pada porsi umum dalam menggunakan anggaran belanja operasi. Dari keseluruhan variabel dapat disimpulkan bahwa Rasio derajat desentralisasi, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian berdasarkan rata-rata perhitungan selama periode 2018-2023 pada

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang baik, Sedangkan untuk Rasio pertumbuhan berdasarkan rata-rata perhitungan menunjukkan hasil kurang baik.

## **5.2 Saran**

### **1. Bagi Perkembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **2. Bagi Peneliti Lain**

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain Metode Keuangan Daerah, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3. Bagi Provinsi Kalimantan Selatan**

Diharapkan hasil dari penelitian ini jadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap mempertahankan atau meningkatkan rasio derajat desentralisasi, efektivitas, efisiensi, keserasian, kemandirian, dan diharapkan lebih meningkatkan lagi rasio pertumbuhan karena berada pada kondisi kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Aedy, H. H., & H. Mahmudin. (2017). Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi: Penuntun Bagi Mahasiswa dan Peneliti). Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahrudin, R. (2017). *Ekonomika otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 72-88.
- Fahmi, I. (2018). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: ALFABET
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah. *Jurnal EBBANK*, 37.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2013) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat
- Jumiati, Prasaja, A. S., & Anita, E. (2022). Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* , Vol.4 No.4.
- Kemenkeu. (2023, 05 20). *Postur APBD*. From kemenkeu.go.id:
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan daerah pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2017) Perpajakan, edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Masyitah As Sahara, Dyan Annisadya Hermarani, & Novica Indriaty. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 6433-6444.
- Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 228-240.
- Putra, S. A. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 – 2020 . *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* , 1-13.
- Ruslana, N., Andi Rustandi, & Dwi Hastuti Lestari Komarlina. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2013-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 139-149.
- Sahara, G. f., & Muzdalifah. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 789-803.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Pulau Sumatra. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 678.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 1-15
- Siregar, C. M., & Harahap, L. H. (2022). Analisis APBD Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2015-2021. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi* , 659-669
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Turnip , A. W. (2022). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 698-706.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah